



# Paripurna Hujan Interupsi

## WDP Lagi, Melawi Balik ke Sintang

MELAWI, TRIBUN - Rapat Paripurna ke 1 masa sidang ke III Tahun 2015, penyampaian rancangan dan KUA PPAS RAPBD yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD, Kamis (8/10), diwarnai hujan interupsi dari sejumlah DPRD.

Para dewan meminta rapat tersebut ditunda, karena ada persoalan yang lebih penting dari agenda rapat yang sedang dilaksanakan, yakni berkaitan dengan pengesahan APBD perubahan.

"Biarkan Anggota Banggar menyelesaikan pembahasan APBD perubahan, jika kita perlu melakukan evaluasi kita akan lakukan evaluasi terhadap APBD perubahan," tegas Anggota DPRD H Bujang Safri.

Hal senada disampaikan

” Saya tidak mau main teken-teken karena APBD Melawi banyak mengalami defisit, tekor. Kalau sudah tekor siapa yang bertanggung jawab. ”

**HATTA**

Penjabat Bupati Melawi

Anggota DPRD Nur Ilham, menurutnya, pengesahan APBD P sangat penting mengingat sampai saat ini dana desa dan dana untuk Pilkada Melawi belum dicairkan, padahal dua hal ini sangat penting.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Pose mengungkapkan DPRD membuka ruang sidang khusus bagi DPRD berkenaan dengan APBD perubahan, sebab dirinya

kerap mendapat pertanyaan dari pihak desa berkenaan dengan pencairan dana desa dan dana pilkada.

"Jangan sampai ada agenda terselubung berkaitan dengan masyarakat," tandasnya.

Pernyataan sejumlah anggota DPRD tersebut langsung dijawab Penjabat Bupati Melawi Hatta sebelum menyampaikan sambutan tertulis berkenaan dengan penyampaian KUA PPAS.

Hatta mengungkapkan, sebagai bupati yang bertanggung jawab atas keuangan daerah, dirinya perlu melakukan pemeriksaan APBD perubahan sebelum diteken, sebab dirinya tidak ikut menyusun APBD perubahan tersebut.

"Saya tidak mau main teken-teken karena APBD Melawi banyak mengalami defisit, tekor. Kalau sudah tekor siapa yang bertanggung jawab tentu saja pemerintah," tandas Hatta.

Dia mengatakan, pembahasan APBD P sudah selesai dan sudah disampaikan kepada pimpinan DPRD, dirinya mengatakan, adanya beberapa item yang terpaksa dicoret karena dianggap tidak wajar, apalagi saat ini waktu pelaksanaannya sudah terlalu mepet.

"Karena penilaian keuangan dari BPK tiga tahun berturut-turut Melawi selalu mengalami WDP. Apabila tahun depan kita kembali mendapat WDP maka kita akan kembali ke Kabupaten Induk, ini merupakan ancaman berat bagi kabupaten Melawi. Karena BPKP sudah memberikan laporan merah terhadap keuangan Melawi," ujarnya.

Hatta mengatakan, hal ini harus disampaikan kepada masyarakat supaya paham, Pemkab ingin kabupaten Melawi menjadi lebih baik di tahun depan. Supaya keuangannya tidak selalu mengalami defisit.

"Maka dari itu kalau kita mau belanja sesuai dengan keuangan daerah. Contoh saja anggaran untuk beli motor, tekor kita," pungkasnya. (ali)



**BERKAS** - Penjabat bupati Melawi, Hatta saat menyerahkan berkas kepada ketua DPRD Melawi Abang Tajudin pada rapat paripurna penyampaian rancangan KUA dan PPAS di ruang sidang DPRD Melawi, Kamis (8/10).